



Buletin

Parlementaria

Nomor 1045/III/III/2019 • Maret 2019



**Pemerintah Harus
Tuntaskan Kekurangan
Bantuan untuk
Masyarakat NTB**



Ketua DPR tolak upaya deligitimasi hasil pemilu 2019

Pemerintah Harus Tuntaskan Kekurangan Bantuan untuk Masyarakat NTB



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat memimpin Rapat Kerja Tim Pengawas (Timwas) Bencana DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak pemerintah untuk segera mencairkan sisa dana bantuan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi korban bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu. Ia menganggap masyarakat NTB hingga saat ini masih berada dalam situasi darurat.

Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan kekurangan alokasi anggaran untuk penanganan bencana di Provinsi NTB, sehingga pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah dapat segera diselesaikan.

Hal ini disampaikan Fahri usai memimpin Rapat Kerja Tim Pengawas (Timwas) Bencana DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Mordano serta perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial, serta Bupati dan Pimpinan DPRD dari berbagai daerah di NTB, terkait

Evaluasi Pembiayaan dan Penanganan Dampak Gempa NTB di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta (13/3).

"Rapat pengawasan ini untuk

"Sudahlah suruh cairkan saja. Ini kan kalau ada gempa begini dalam perspektif pembiayaan yang kita sebut ini adalah dukungan sedekah, yang tidak perlu terlalu banyak kita bicara prosedur."

memastikan bahwa bantuan kepada masyarakat kita itu harus terealisasi tepat, karena apapun ini kan situasi darurat. Orang di sana masih banyak yang hidup di tenda, dan belum mendapat bantuan terutama perumahan. Itu sangat berbahaya karena saat ini musim hujan dan sebagainya," ujar Fahri.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menginginkan agar pemerintah dapat *concern* terhadap permasalahan ini. Terlebih masalah pembiayaan ini sudah melampaui target yang dijanjikan pada Desember 2018 lalu. Selain itu, tujuannya mengundang pemda terkait karena ia berharap lubang-lubang yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dapat ditelusuri serta ditemukan solusinya.

"Setelah ini pemda pulang ke daerah, ketika ditanya oleh masyarakat bisa menjawab. Saya kira itulah harapan kita dan kita ingin sekali pemerintah *concern* terhadap hal ini. Kan nominalnya juga tidak terlalu banyak, paling banyak cuma Rp 1,4 triliun. Sudahlah suruh cairkan saja. Ini kan kalau ada gempa begini dalam perspektif pembiayaan yang kita sebut ini adalah dukungan sedekah, yang tidak perlu terlalu banyak bicara prosedur," tegas Fahri.

Legislator dapil NTB itu juga menyampaikan bahwa Tim Pengawas Bencana DPR RI mendesak pemerintah untuk memperbanyak perbankan selain BRI terkait penyaluran bantuan ini. Ia meminta agar bank itu tidak menjadi lembaga verifikasi, karena hanya memperlambat prosedur saja. "Kalau bisa uang yang ditransfer itu jangan ke BRI saja, suruh transfer di NTB itu pakai bank lain. Kan bank BUMN banyak juga, supaya dapat mempercepat ini," tukas Fahri.

Sementara itu, Kepala BNPB Doni Mordano menyatakan, pihaknya ingin membentuk tim khusus dalam upaya menangani bencana di Indonesia. Tim tersebut nantinya terdiri dari TNI dan Polri. Diketahui, personel TNI yang diturunkan untuk menangani dampak gempa NTB mencapai 1.000 orang. Jumlah itu terdiri dari 800 orang personel TNI AD dan 200 orang dari TNI AL.

Doni meyebut, selama penanganan bencana di NTB pada 29 Juli 2018 lalu, TNI sangat berjasa. Tentara yang berada di lokasi bencana tidak hanya membantu perbaikan terhadap infrastruktur, tapi juga perbaikan moral dan semangat warga korban bencana. "Setelah gempa di NTB, TNI juga turut berbaur dengan masyarakat dan membuat mereka semangat kembali," ujar Doni. ■ **er/sf**

Foto Erman Iri



Foto: Rumi Irti

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Sekretariat Nasional (Seknas) GARBI

Ketua DPR: Tolak Upaya Deligitimasi Hasil Pemilu 2019

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI), yang tidak menginginkan adanya berbagai upaya deligitimasi terhadap hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Penghormatan terhadap hasil Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penghormatan atas suara rakyat. Ia berharap pasca Pemilu pada 17 April 2019, Bangsa Indonesia tetap berada dalam satu naungan kebangsaan.

“Karenanya, kita harus antisipasi berbagai gejala yang bisa merobek persaudaraan. Jika ada kelompok yang ingin melakukan upaya mendeligitimasi hasil Pemilu, artinya mereka sedang menjegal kedaulatan rakyat. Kita tak boleh biarkan hal itu sampai terjadi,” tegas Bamsot, sapaan akrabnya, saat menerima Sekretariat Nasional (Seknas) GARBI di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).

Beberapa pengurus GARBI yang hadir antara lain Sutriyono (Ketua Umum), Fikri (Bendahara), Ananto (Ketua Ideologi dan Penggalangan), Feri (Ketua GARBI DKI Jakarta), Nandang Burhanduin (Ketua GARBI Jawa Barat), Luthfi (Ketua GARBI

Yogyakarta), dan Fris (Ketua GARBI Jawa Tengah).

Guna menutup ruang deligitimasi terhadap hasil Pemilu 2019, GARBI berharap adanya penguatan terhadap lembaga pemantau Pemilu. Baik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun dari masyarakat sipil (*civil society*). Sebagai organisasi kemasyarakatan yang lahir atas berbagai kegelisahan rakyat, GARBI juga akan menjadi bagian dalam menjaga Pemilu 2019 agar bisa berkualitas dan berintegritas.

Sejalan dengan itu, legislator Partai Golkar ini juga menaruh harapan besar kepada GARBI sebagai ormas baru untuk memperkuat pengawasan dari sisi *civil society*. Sekaligus mengajak masyarakat agar bisa turut aktif menggunakan hak pilihnya.

“Tak hanya dari sisi *civil society*, para anggota GARBI yang muda, *smart*, dan militan ini juga bisa mewarnai wajah partai politik agar menjadi lebih dinamis. Ide, gagasan dan cara pandang anak-anak muda dalam melihat dunia perlu diresapi oleh partai politik,” ujar Bamsot.

Lebih jauh, Bamsot menambahkan, walaupun secara usia organisasi kemasyarakatan GARBI masih relatif sangat muda, namun para anggotanya sudah cukup kawakan dalam dunia

sosial kemasyarakatan. Dirinya percaya pergerakan GARBI akan cepat melesat dan menjadi sumber rekrutmen kader-kader partai politik yang piawai. Untuk itu, menjelang pesta demokrasi 17 April mendatang, Garbi harus menjadi AC pendingin atau penyejuk dan tidak menjadi “kompor meleduk”.

“Tak hanya sekadar meramaikan, GARBI akan menjadi salah satu sumber rekrutmen SDM partai politik dan menjadi pemain kunci dalam berbagai isu sosial kemasyarakatan. Melepaskan berbagai belenggu yang masih menyelimuti bangsa Indonesia, seperti kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan peradaban,” tutur Bamsot.

Karena mengusung *tagline* “Islam, Nasionalisme, Demokrasi dan Kesejahteraan,” legislator dapil Jawa Tengah VII ini menaruh harapan besar kepada GARBI agar bisa menjadi penyejuk bangsa. Ajaran agama apapun, harus dijadikan sumber kebajikan dalam berperilaku, bukan justru dijadikan alat pemuas ego atau senjata yang menyebabkan perpecahan.

Jika konsisten dengan garis perjuangannya, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menilai GARBI bisa membawa lompatan besar bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, Indonesia menjadi patokan dan tolak ukur kesuksesan kolaborasi islam dengan demokrasi.

“Walaupun sejauh ini kita sudah *on the track*, namun bukan berarti boleh lengah. Semangat kebangsaan harus tetap dikumandangkan agar kita selalu ingat, bahwa Indonesia adalah tanah yang harus dijaga bersama,” pungkas Bamsot. ■ **sf**



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menerima aspirasi yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Deden Syamsuddin beserta jajarannya

Foto : Geraldi I rni

BPD Berperan Awasi Dana Desa

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memastikan akan berkirim surat kepada pemerintah untuk dapat mengefektifkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Dana Desa.

Menurut Fadli, penting untuk memberdayakan BPD dalam pengawasan Dana Desa yang saat ini dinilai banyak diselewengkan.

Hal itu diungkapkan Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu saat menerima aspirasi yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional

(ABPEDNAS) Deden Syamsuddin beserta jajarannya, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2).

“Saat ini banyak kasus penyelewengan Dana Desa di beberapa wilayah. Untuk itu, memberdayakan BPD yang ada di hampir setiap desa diharapkan dapat mengurangi penyelewengan Dana Desa. Selain itu, Anggota BPD juga bisa diberdayakan dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat,” papar legislator F-Gerindra itu.

Sebelumnya, di hadapan Fadli Zon, Deden menyampaikan keluhannya mengenai asosiasi BPD yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal, BPD dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“BPD adalah penyelenggara pemerintah bersama perangkat desa. Tugas kami itu mengawasi, menerima aspirasi, memberikan informasi serta merencanakan anggaran. Namun selama ini pemerintah hanya fokus kepada perangkat desa saja. Jangan sampai kami dilahirkan tetepi dilupakan,” keluh Deden. ■ **mm/sf**

“Saat ini banyak kasus penyelewengan Dana Desa di beberapa wilayah. Untuk itu, memberdayakan BPD yang ada di hampir setiap desa diharapkan dapat mengurangi penyelewengan Dana Desa.”

Komisi I Bahas Hubungan Bilateral Indonesia dengan Kepulauan Cook dan Niue



Foto: Geraldini I mi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha saat Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menjelaskan, hasil pembahasan ini nantinya menjadi pertimbangan Pimpinan DPR RI, yang kemudian disampaikan kembali kepada Presiden.

“Kepulauan Cook dan Niue berada di kawasan Pasifik Selatan sebagai negara yang merdeka, namun dalam beberapa aspek masih mempunyai hubungan dengan Selandia Baru.

Kita meminta melalui hubungan bilateral ini, Indonesia bisa meningkatkan *capacity building* kepada kedua negara itu. Mengingat kedua negara tersebut merupakan negara kepulauan,” ujar Satya, usai menghadiri Raker dengan Menlu RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/3).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan, melalui kontribusi Indonesia dalam memberikan *capacity building*, kerja sama itu tidak hanya menguntungkan Indonesia dari sisi wilayah, karena mereka berada di Pasifik Selatan.

Namun, Satya berharap agar kedua negara tersebut juga menyuarakan hal positif tentang Papua, dan sebaliknya Indonesia juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara tersebut sebagai negara kecil.

Hasil pertemuan rapat dengan Menteri Luar Negeri ini, Komisi I DPR menyetujui permintaan Presiden tersebut. Namun dengan catatan, persetujuan tersebut tidak langsung diputuskan bersama Menlu, melainkan Komisi I menyampaikan kepada Pimpinan DPR melalui Badan Musyawarah (Bamus) untuk selanjutnya diteruskan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden,” pungkas legislator dapil Jawa Timur itu. ■ **pun/sf**

melalui kontribusi Indonesia dalam memberikan *capacity building*, kerja sama itu tidak hanya menguntungkan Indonesia dari sisi wilayah, karena mereka berada di Pasifik Selatan.



Pemerintah Harus Tuntaskan Kekurangan Bantuan untuk Masyarakat NTB

Ketua DPR tolak upaya deligitimasi hasil pemilu 2019

- PENGAWAS UMUM**
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Sofyan Efendi
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra
SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari
ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H., Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Natasya Amanda Prihandini, S.Kom. Rahayu Setyowati, Muhammad Husen Virgianne Meiske, Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli Singgih Rimbani Kinanti, Siti Nadiyah, Rryan Hidayat, Anrimbi Puspita Ratri, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha, Puntho Pranowo.
FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah Geraldini Opie.
ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Nathan Dimas Saminto, Safitri Restu Widayati. SIP.
INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto.
ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher
- PENERBITAN**
PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
DESAIN GRAFIS
Dito Sugito
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman
PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspa
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Komisi I dan Pemerintah Sepakati RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Rusia

Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan telah disepakati oleh 10 fraksi di Komisi I DPR RI bersama pemerintah untuk dibawa ke pembahasan tingkat II pada Rapat Paripurna mendatang.

Hal ini ditandai dengan diketuknya palu oleh pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais dan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan oleh perwakilan Fraksi dan pemerintah yang diwakili Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3).

“Saya kira perwakilan tiap Fraksi di Komisi I ini dan pemerintah sudah sepakat mengenai pengesahan persetujuan ini. Maka dari itu saya nyatakan bahwa dokumen ini dapat kita setuju untuk dibawa ke pembahasan lebih lanjut, yaitu dalam Rapat Paripurna berikutnya,” tegas Hanafi bersamaan dengan pengetukan palu.



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Namun Hanafi memberi catatan kepada pemerintah agar selalu melibatkan atau minimal melaporkan kepada DPR RI dalam proses implementasi undang-undang tersebut nantinya. Menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi perjalanan sistem bernegara di Indonesia selain itu juga Undang-Undang tersebut tentunya memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

“Selanjutnya proses rancangan ratifikasi harus bisa melembagakan ruang konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI, karena itu menjadi bagian dari amanat konstitusi kita, sehingga masyarakat yang akan terkena dampak luasnya, tentu harapannya secara positif betul-betul bisa terlibat dan ini menjadi tanggung jawab kita semua,” imbuh Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Selain itu, Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanti tidak ingin berpikiran negatif bahwa Rusia ingin turut campur dalam proses demokrasi Indonesia. Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini berharap agar pengesahan kerja sama pertahanan ini tentunya dapat membawa hubungan Indonesia dan Rusia ke dalam hubungan positif.

“*Enggak usah ikut cawe-cawe deh* di dalam Pemilu, karena kita tahu banyak sekali beredar di media sosial adanya keikutsertaan negara asing dalam penyelenggaraan Pilpres ke depan. Kita harap Rusia yang memang memiliki teknologi yang canggih bisa memanfaatkan apa apa yang mereka miliki tersebut untuk hal hal yang positif bagi bilateral kedua negara,” jelas Evita. ■ **er/sf**

Komisi III Sahkan Dua Hakim MK

Komisi III DPR RI mengumumkan dua nama calon hakim konstitusi yang telah sahkan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedua hakim tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi Tim Panel Ahli dalam musyawarah mufakat. Adapun nama kedua Hakim MK tersebut adalah Aswanto dan Wahiduddin Adams.

“Meskipun sempat ada nama lain yang paling banyak disebut, namun secara keseluruhan nama-nama yang

direkomendasikan oleh Tim Panel Ahli adalah kedua nama tersebut, “ ujar Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani (F-PPP) dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan (F-PDI Perjuangan) menegaskan, Hakim MK terpilih, harus mempunyai kapabilitas dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) yang meliputi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

“Melalui pertimbangan tersebut, seluruh Fraksi di Komisi III menyepakati

bahwa kedua nama hakim terpilih dinilai bisa mengawal proses persidangan di MK, terutama dalam menghadapi Pileg dan Pilpres mendatang,” ungkap Trimedya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik (F-Demokrat) pada kesempatan yang sama menambahkan, Fraksinya menyetujui dua nama hakim terpilih yang merupakan hasil rekomendasi dari Tim Panel Ahli dalam mengawal agenda politik Indonesia ke depan.

“F-Demokrat percaya, bahwa kedua hakim tersebut adalah nama yang bisa mengawal proses agenda politik ke depan di MK, dalam konteks kemungkinan terjadinya sengketa dalam Pileg dan Pilpres,” pungkas Erma. ■ **pun/sf**

Permasalahan Batam Tak Bisa Diselesaikan Dengan Tambal Sulam

Anggota Komisi II DPR RI Dwi Ria Latifa mengatakan permasalahan di Kota Batam cukup kompleks dan tidak bisa serta merta diselesaikan dengan sebuah keputusan yang dibuat tambal sulam.



Foto: Erman Irfi

Anggota Komisi II DPR RI Dwi Ria Latifa saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kepulauan Riau dan Kadin Kota Batam

Harus dilihat secara komprehensif dari akar permasalahannya hingga memunculkan polemik seperti saat ini.

Demikian diungkapkan Ria, sapaan akrabnya, kepada **Parlementaria** setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia

(Kadin) Kepulauan Riau dan Kadin Kota Batam di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/03).

“Jangan ada keputusan yang dibuat tambal sulam. Sebetter *bikin* keputusan A, sebetter *bikin* keputusan B. Ditambah lagi yang membuat keputusan tidak memahami secara komprehensif dari bawah ke atas dalam melihat persoalan Batam itu seperti apa,” terang Ria.

Dalam RDPU ini politisi dapil Kepulauan Riau ini mengusulkan agar dibuat Panitia Khusus (Pansus) guna menyikapi permasalahan di Batam. Dan ia bersyukur usulan tersebut mendapat respon positif dari seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang hadir dalam RDPU ini.

“Saya bersyukur dengan disetujui oleh rekan-rekan yang secara fraksi, sebetulnya sudah kuorum, ditambah lagi Ketua Komisi II juga sudah mengetok kesimpulan yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi satu solusi yang sifatnya permanen untuk persoalan yang ada di Batam,” ucapnya.

Kelak, dengan terbentuknya Pansus Ria berharap supaya semua *stakeholder* yang memiliki kepentingan dengan Batam dapat duduk bersama mencari jalan keluar bagi otorita Batam dan sudah tentu sejalan dengan peraturan perundangundangan. Sehingga Pansus ini bisa menjadi solusi untuk penyelesaian Batam yang betul-betul permanen.

Ditambahkan Ria, kondisi perekonomian Batam menjadi suram dan buram gara-gara sebuah keputusan yang menurutnya tidak tepat. Ia paham betul bagaimana kondisi Batam sekarang ini, ia juga telah siap bilamana kelak terjadi pro kontra terkait berbagai permasalahan yang ada di Batam.

“Pro kontra masalah Batam ini yang berkaitan dengan banyak hal. Mulai dari *ex-officio* rangkap jabatan, hingga persoalan-persoalan rumit yang berkaitan dengan tanah penduduk masih dianggap rumah liar atau tanah ilegal, karena dianggap tanah hutan lindung. Padahal mereka sudah beranak-pinak di situ,” tegas Ria.

Mewakili konstituennya, ia berharap dengan terbentuknya Pansus, Batam tidak hanya sekedar dibicarakan oleh pihak-pihak tertentu, namun penyelesaian atas permasalahannya agar dibahas secara komprehensif di DPR RI dengan melibatkan mereka yang mempunyai kepentingan dan menginginkan kemajuan Batam. ■ **es/sf**



Foto: Oji Irfi

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani (F-PPP) berikan keterangan usai menentukan dua nama calon hakim konstitusi yang telah disahkan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin mempertanyakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti terkait pelarangan menjual telur (bibit) kepiting dan lobster ke luar negeri.

Pada hal menurutnya, masih banyak kepiting dan lobster yang diselundupkan. Salah satunya di daerah pemilihannya, Kabupaten Bone, yang merupakan pusat kepiting telur, banyak yang diselundupkan ke Malaysia.

“Bahkan Malaysia menjadi pengeksport kepiting. Dengan kata lain, masyarakat kita dilarang menangkap, tapi pengusaha-pengusaha malah menyelundupkan. Ini tentu malah akan menguntungkan negara lain,” papar Andi Akmal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KP Susi Pudjiastuti beserta jajaran di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (12/3).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, begitupun dengan lobster yang banyak diselundupkan ke Vietnam. Akibatnya, Vietnam yang sebelumnya tidak memiliki lobster, bahkan di alamnya pun tidak pernah ada lobster, namun bisa melakukan ekspor. Tentu hal ini hanya akan menguntungkan Vietnam.

“Intinya untuk kelestarian lobster dan kepiting dalam negeri, kita dukung

kebijakan ini. Namun tentunya pengawasannya juga harus diperketat, agar tidak ada lagi penyelundupan yang dilakukan pengusaha. Artinya jika masyarakat dilarang, maka pengusaha pun harus terus diawasi,” tegas legislator dapil Sulawesi Selatan itu.

Menjawab hal tersebut, Menteri KP Susi Pudjiastuti mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri tentang pelarangan penjualan lobster dan kepiting itu tidak pernah dilakukan kepada rakyat, namun kepada penyelundup. Indonesia dulu ekspor luar biasa, namun beberapa tahun terakhir jumlahnya turun drastis. Tidak hanya itu, jika ditarik ke atas sebelum tahun 2012, ekspor lobster Vietnam sebesar 30 juta ekor lebih.

Namun setelah dilakukan penertiban melalui Permen KP tersebut ekspor lobster Vietnam terus menurun. Dari tahun 2014 sebesar 13 juta ekor, tahun 2017 menurun



Foto: Erman/rni

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin

menjadi 6 juta ekor lebih. “Saya akan sikat seluruh eksportir yang melakukan pelanggaran peraturan saya. Saya akan bikin ekspor lobster Vietnam menjadi nol,” tegas Susi. ■ **ayu/sf**

Komisi VI Dukung Pengembangan PT. Barata Indonesia

Komisi VI DPR RI mendukung PT. Barata Indonesia (Persero) menjadi industri strategis yang tumbuh dan berkembang. Terutama, kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana, sejak perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur itu mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan nilai sebesar Rp 500 miliar.

“PT. Barata Indonesia (Persero) telah memproduksi beberapa peralatan alat berat, terutama peralatan untuk pabrik gula, peralatan kereta api barang, dan beberapa peralatan yang di ekspor ke Amerika jadi kita perlu mendukung industri strategis ini yang kelihatannya sudah tumbuh,” kata Azam saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Barata Indonesia (Persero) di Gresik, Jawa Timur, Selasa (12/3).

Selain menggelar pertemuan dengan



Foto: Chasbi/rni

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana memberikan keterangan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Barata Indonesia (Persero) di Gresik, Jawa Timur

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo berharap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor dapat segera diterbitkan.

Komisi V Harap RPM Perlindungan Sepeda Motor Segera Diterbitkan

Adanya regulasi tersebut diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum moda transportasi roda dua, khususnya untuk ojek *online* dan ojek pangkalan.

Hal itu diungkapkan Sigit usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/3). Turut hadir 10 perwakilan asosiasi *driver* ojol, serta Grab dan Gojek sebagai aplikasi.

“Kami mengapresiasi pemerintah menyodorkan RPM ini kepada Komisi V sebelum diberlakukan. Kami juga meminta agar aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, keadilan, dan keterjangkauan harga dapat dikedepankan,” ungkap Sigit. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkannya, hadirnya RPM ini memberikan legitimasi bahwa ojek *online* maupun ojek pangkalan (opang), keduanya dilindungi negara, sambil menunggu pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Direksi PT. Barata Indonesia (Persero), Tim Kunspek Komisi VI DPR RI juga meninjau langsung kondisi bagian produksi salah satu perusahaan BUMN ini. Azam mengaku melihat beberapa peralatan untuk pabrik kelapa sawit dan peralatan yang bekerjasama dengan Jerman yang dipakai Pelindo III.

Selain itu ada juga seperti Cement Kiln berdiameter 4,6 meter yang dipesan oleh Maroko. Jadi artinya kita perlu mendukung PT. Barata Indonesia (Persero) untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi,” tambah legislator Partai Demokrat itu.

Azam memastikan, pihaknya senantiasa mendukung tumbuh dan berkembangnya industri strategis seperti PT. Barata Indonesia.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik meninjau progres pembangunan Stasiun Light Rail Transit (LRT) Taman Mini di Cipayang, Jakarta Timur

Foto: Jaka Irfi

Sigit menambahkan, rancangan peraturan tersebut telah mempertemukan antara kepentingan aplikasi, pengemudi sebagai mitra dan juga masyarakat sebagai konsumen. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir konflik horizontal antara

ojek *online* dan ojek pangkalan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyampaikan, draf RPM ini mengatur empat poin penting, yaitu aturan *suspend*, kemitraan, tarif, serta keselamatan. “Terutama, masalah *suspend* ini jangan sepihak dirasakan oleh mitra, nantinya seperti apa kita akan atur begitu juga dengan tarif,” ungkapnya.

Kendati demikian, besaran tarif ojek *online* belum diatur secara terperinci. Budi mengatakan, penentuan tarif ojek *online* biasanya terbagi menjadi dua komponen, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Berdasarkan kesepakatan dengan pihak aplikasi, pemerintah hanya bisa menentukan biaya langsung.

“Kita memutuskan biaya langsung ada 11 aspek. Kemudian ada masukan dari Komisi V untuk memberlakukan batas atas agar melindungi kepentingan konsumen. Nanti akan coba kita diskusikan kembali,” papar Budi.

Ia menargetkan peraturan menteri tersebut bisa segera diterapkan. Namun pihaknya akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Mahkamah Agung (MA) sehingga nantinya tidak di-*judicial review*. “Gunanya supaya nanti regulasi ini begitu jalan, tidak ada penolakan-penolakan. Termasuk saya juga konsultasi kepada Mahkamah Agung,” pungkasnya. ■ **ann/sf**

Komisi VI DPR RI meminta kepada pemerintah dan Kementerian terkait khususnya Kementerian Perindustrian, untuk mendukung industri tersebut.

“Dari hasil (produksi) PT. Barata Indonesia, penggunaannya bukan hanya untuk diekspor saja, tapi juga penggunaannya bisa digunakan di dalam negeri, seperti untuk kelapa sawit dan pabrik semen, sehingga *demand*-nya menjadi lebih besar,” tutur Azam.

Di sisi lain, legislator dapil Jawa Timur III itu menambahkan, usai Pemilu mendatang, Komisi VI DPR RI akan mengundang Direksi PT. Barata Indonesia untuk menyampaikan margin dari masing-masing divisi terkait dengan keuntungan PT. Barata Indonesia secara keseluruhan. C

Industri Farmasi Indonesia Rambah Pasar Internasional

Anggota Komisi VI DPR RI Adang Daradjatun mengatakan, secara makro keuangan, PT. Biofarma (Persero) dan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam industri kefarmasian di Indonesia telah banyak mengalami kemajuan.



Anggota Komisi VI DPR RI Adang Daradjatun saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat

Foto: Dep Iri

Hasil produksi perusahaan plat merah tersebut memiliki pangsa pasar yang besar di dalam negeri, dan kini semakin merambah ke pasaran internasional.

“Saya melihat kemajuan perusahaannya sudah sangat baik, karena memang pangsa pasar obat hasil produksi Biofarma dan juga

“... masyarakat Indonesia perlu diberikan pemahaman dan keyakinan mengenai keunggulan khasiat dari produk Biofarma dan Kimia Farma yang tidak kalah baiknya dari produk obat kimia sejenis yang berasal dari luar negeri..”

Kimia Farma sangat besar dan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ucap Adang di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, Rabu (13/3).

Yang lebih menggembirakan, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, selain masyarakat Indonesia, ternyata hasil produksi perusahaan BUMN itu sudah merambah ke luar negeri. Beberapa negara luar, khususnya yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), telah bisa menerima produk-produk buatan Kimia Farma dan Biofarma.

“Meski demikian, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, yakni tantangan yang berhubungan dengan bahan baku. Dimana bahan baku untuk keperluan produksi yang diimpor dari luar negeri jumlahnya masih cukup besar. Hal inilah yang perlu dipikirkan, yakni agar bisa mendapatkan produk yang bahan dasarnya berasal dari dalam negeri kita sendiri,” ujarnya.

Adang juga meminta agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap bidang riset dan penelitian, khususnya kepada PT. Kimia Farma dan PT. Biofarma, agar bisa meningkatkan serta memajukan hasil penelitiannya. “Saya mendorong Biofarma dan Kimia Farma bisa mencapai peringkat tiga besar, minimal di tingkat ASEAN. Ini merupakan sebuah peluang besar,” tandas Adang.

Menurut legislator dapil DKI Jakarta III itu, masyarakat Indonesia perlu diberikan pemahaman dan keyakinan mengenai keunggulan khasiat dari produk Biofarma dan Kimia Farma yang tidak kalah baiknya dari produk obat kimia sejenis yang berasal dari luar negeri.

“Sebab obat hasil produksi Biofarma dan Kimia Farma sudah diakui oleh WHO (World Health Organization), sehingga tidak perlu lagi ada keraguan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh Biofarma maupun Kimia Farma,” tutupnya. ■ dep/sf



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam berfoto bersama dengan jajaran direksi TPPI, di Tuban, Jatim usai melakukan pertemuan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menilai, proyek pengembangan Kilang Minyak Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, merupakan proyek petrokimia terbesar di Asia.

Kendati pengembangannya baru berjalan setengah, Komisi VII DPR RI meminta agar pengembangan TPPI dioptimalkan.

“Sehingga TPPI bisa beroperasi secara mandiri, tidak lagi tergantung pada Pertamina dan Petro Tuban. Ini



Foto Singgih Irti

Komisi VII Minta Kilang Minyak TPPI Dioptimalkan

seharusnya bisa berjalan dengan mandiri, dengan melihat potensi yang dimiliki dan investasi yang sudah ada,” ungkap Ridwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI bertemu dengan direksi TPPI, di Tuban, Jatim, Sabtu (09/3).

Politisi Partai Golkar itu mengingatkan, direksi TPPI harus bisa mandiri dan bekerja sama dengan pihak ketiga, tapi tidak membebani Pertamina maupun Petro Tuban sebagai pemilik perusahaan TPPI itu sendiri. Menurutnya, jika TPPI ini bisa mandiri, maka keuangannya pun tidak akan

lagi merah seperti saat ini.

Lebih lanjut, Ridwan berharap dalam waktu dua tahun ke depan, TPPI mampu kembali normal dibandingkan saat ini. Selain itu, diharapkan Pertamina mampu menjadi pemilik mayoritas saham TPPI ini, karena saat ini Pertamina baru memiliki sekitar 42 persen saham TPPI. Menurutnya, jika Pertamina sudah mampu memiliki saham TPPI hingga di atas 70 persen, negara bisa mengelola secara maksimal.

“Ini kedatangan kita yang kedua ke sini. Yang pertama September 2018 lalu,

namun ternyata saat ini belum ada perkembangan. Maka kita genjot kembali agar segera selesai dan tahun ini bisa dijalankan. Tidak ada kata tidak bisa, ini tergantung keberanian kita dengan memperhitungkan risikonya. Tidak ada bisnis yang tidak ada risikonya. Selama risiko itu bisa diantisipasi dan diminimalisasi, pasti bisa berjalan,” ujar Ridwan.

Pengembangan Kilang TPPI ini diharapkan mampu mendukung ketahanan industri petrokimia nasional dan mampu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri serta mengurangi impor energi Indonesia. Pengembangan Kilang TPPI ini nantinya akan terintegrasi dengan rencana pembangunan kilang baru oleh Pertamina di Kabupaten Tuban. ■ skr/sf

Pemprov Kepri Harus Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan banyak terjadi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akibat penyalahgunaan izin pertambangan dan pengelolaan limbah.



Foto: Husen Itri

Ketua Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat sidak ke lokasi tambang PT. Gunung Bintang Abadi (GBA)

Ketua Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menegaskan, pihaknya ingin memastikan bahwa kerusakan lingkungan di Kabupaten Bintan, Kepri, akibat penambangan bauksit yang dilakukan PT. Gunung Bintang Abadi (GBA). Nasir juga mempertanyakan izin yang diberikan Pemda setempat kepada perusahaan tersebut.

PT. GBA jadi sorotan Panja Limbah dan Lingkungan. Dalam sidak ke lokasi tambang tersebut, Jumat (08/3), Nasir sempat berdialog langsung dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Kepri yang memberikan izin tambang, tanpa melihat kerusakan lingkungan yang terjadi. "Perusahaan ini harus segera diperiksa. Pemerintah Kepri juga harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan ini, karena mereka yang mengeluarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan)," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.

Lokasi tambang bauksit sendiri berada di tengah kawasan hutan mangrove di Pulau Bintan. Eksplorasi bauksit di sana tak terkendali. Pemerintah Kabupaten Bintan sendiri banyak mengeluarkan izin dengan

Pemerintah Harus Siapkan Angkatan Kerja Handal Hadapi Era Digital

Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri menekankan agar pemerintah mempersiapkan angkatan kerja dengan *full skill* yang handal menghadapi era digital. Tantangan era industrialisasi abad keempat tidak bisa dipungkiri, oleh sebab itu semua pemangku kepentingan harus mampu menghadapi tantangan zaman.

“ Kita minta pemerintah semakin antisipatif dengan mempersiapkan angkatan kerja yang *full skill* untuk menghadapi berbagai fenomena baru itu,” ungkap Syamsul saat

memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali, Selasa (12/3).

Kunjungan ini mendalami berbagai masalah yang terkait dengan dampak digitalisasi industri *online* terhadap pekerja pada perusahaan ritel. Dari beberapa sumber menyatakan, 71 juta pekerjaan akan hilang karena era digital, dan hanya 2,1 juta pekerjaan baru yang tumbuh yaitu bidang matematika, teknik dan komputer.

Selain itu, melalui kunspek ini diharapkan Komisi IX DPR RI mendapat berbagai informasi dan masukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap dampak digitalisasi industri *online* terhadap pekerja pada perusahaan ritel ke Provinsi Bali untuk perlindungan pekerja dimasa yang akan datang.

“Digitalisasi cepat atau lambat nanti akan menggerus lapangan kerja



Foto: Eiko Itri

Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri

harapan mendapat tambahan PNPB. “Kita minta Dirjen Gakkum mengecek semua regulasi ini dan menghentikan seluruh kegiatan yang menurut kami melanggar aturan hukum,” tandas Nasir.

PT. GBA bahkan mendapat izin ekspor bauksit dari Kementerian ESDM dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan seberat 1,6 juta metrik ton ke China mulai 19 Maret 2018 sampai dengan 19 Maret 2019. Setelah dievaluasi berdasarkan hasil pengawasan Kementerian ESDM terhadap pembangunan *smelter*, Dirjen Minerba mengeluarkan surat tanggal 8 Februari 2019 tentang pencabutan rekomendasi ekspor mineral logam dengan kriteria tertentu kepada PT GBA.

“Karena sangat merugikan alam dan melanggar regulasi Kementerian ESDM dan KLHK, kita akan panggil perusahaan ini dalam RDP dengan Dirjen Gakkum KLHK, Dirjen Minerba, Bareskrim, Jampidsus, termasuk Kemendag, dan Kemenperin untuk melihat apa yang terjadi di Kepri ini,” kata politisi Partai Demokrat itu. Ironisnya, perusahaan tambang yang sudah dapat IUP dan izin ekspor dari Kementerian ESDM ini justru tak mampu menjaga kelestarian lingkungan di sekitar areal pertambangan. ■ **mh/sf**

yang selama ini diisi oleh banyak tenaga kerja kita. Jadi oleh karena itu kita minta kepada pemerintah khususnya, kepada pemerintah daerah untuk mencari langkah antisipatif untuk meminimalisasi dampak dari bisnis *online* ini, digitalisasi di sektor *ritel* dan lainnya,” jelas Syamsul.

Kunspek ini juga melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Pemprov Bali, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara dan Papua, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi Bali

Selain itu, Komisi IX juga didampingi Dirjen Binapenta dan PPK Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dirjen Binwas dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. ■ **eko/sf**

PT. Phapros Diharapkan Perkuat BUMN Farmasi



Foto: Surya Irti

Anggota Komisi VI DPR RI Martri Agoeng (kedua kiri) saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Phapros, di Semarang, Jawa Tengah

Anggota Komisi VI DPR RI Martri Agoeng menilai, bergabungnya PT. Phapros ke PT. Kimia Farma, PT. Bio Farma, dan PT. Indo Farma, bisa membuat BUMN farmasi semakin kuat dan *marketshare*-nya semakin baik.

Diharapkan, BUMN farmasi ini tidak semata-mata mementingkan bisnis, namun juga berperan sebagai agen pembangunan. Sehingga, bila BUMN farmasi memberikan produk terbaiknya dan mampu bersaing dengan farmasi swasta, program-program pelayanan kesehatan kepada rakyat dapat terlayani dengan baik.

“PT. Phapros termasuk industri unggulan di bidang farmasi yang perlu mendapatkan perhatian Komisi VI DPR RI, agar nantinya kemandirian industri farmasi kita tidak tergantung dari asing. Selain itu dapat memberikan nilai tambah, khususnya harga obat-obatan

ke konsumen bisa terjangkau, serta bisa memproduksi sendiri bahan-bahan farmasi dengan paten,” ujar Martri di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Phapros, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/3).

Kunspek Komisi VI DPR RI ke PT. Phapros ini membahas terkait investasi dan minat pembelian saham PT. Phapros oleh PT. Kimia Farma. Investasi pada PT. Phapros dalam bentuk aliansi strategis melalui pengambilalihan/pembelian atas seluruh saham yang dimiliki PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI), sebagai pemilik mayoritas saham PT. Phapros.

Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah melalui BUMN yang mencanangkan pembentukan *holding* BUMN farmasi. Diharapkan, dengan *holding* BUMN farmasi itu, perusahaan farmasi yang tergabung di dalamnya akan lebih fokus, lebih efisien, pengadaan bahan baku bisa lebih murah, serta ketersediaan dan harga obat di masyarakat dapat terkendali. Martri menambahkan, proses *holding* perusahaan farmasi di Kementerian BUMN ini turut menjadi perhatian khusus Komisi VI DPR RI.

■ **soe/sf**

Komisi X Apresiasi Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten Semarang

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto mengapresiasi pengelolaan Perpustakaan Kabupaten Semarang yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pasalnya tak hanya koleksi buku yang cukup banyak, perpustakaan ini juga dibarengi dengan adanya kegiatan yang memacu orang untuk membaca buku.

Terhitung di Perpustakaan Kabupaten Semarang ini memiliki koleksi sebanyak 39 ribu judul buku dan lebih dari 76 ribu eksemplar buku. Dalam setiap harinya,



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto mengapresiasi pengelolaan Perpustakaan Kabupaten Semarang ucapnya saat melakukan Kunjungan Kerja

perputakaan ini dikunjungi sekitar 400 sampai 500 pengunjung.

“Berarti keberadaan perpustakaan ini sudah menjadi bagian dari pada seluruh aktivitas pendidikan yang ada di Kabupaten Semarang ini,” ungkap Djoko saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat, (08/3).

Politisi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan bahwa perpustakaan ini juga memberikan pendidikan di luar membaca buku yaitu memberikan kreativitas pada peserta atau anggota perpustakaan ini seperti membuat kerajinan tangan mulai dari membuat tempat tisu dan juga boneka.

“Atas kreativitas semacam ini, maka sungguh kami memberikan apresiasi.

Juga ada kegiatan yoga di sini, sehingga ini betul-betul membuat masyarakat pintar membaca buku tapi juga membuat masyarakat cerdas,” apresiasi Djoko.

Meskipun memberikan apresiasi, Djoko mencatat masih terdapat keluhan yang diterima usai melakukan dialog dengan para relawan atau simpatisan perpustakaan

Komisi IX Dorong Pemerintah Benahi BLK

Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz mendesak pemerintah untuk mencari solusi dan terobosan baru untuk membenahi Balai Latihan Kerja (BLK).



Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi IX memberikan cendra mata kepada jajaran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur usai mengikuti pertemuan

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan saat ini, ada 281 BLK di seluruh Indonesia. 19 diantaranya adalah BLK milik Kemenaker, sedangkan sisanya 262 dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sayangnya yang berjalan dengan baik hanya 10 persen.

“Saya khawatir, visi untuk memajukan SDM (Sumber Daya Manusia) tidak berjalan dengan baik. Apalagi kita akan memasuki Revolusi Industri 4.0, ketika manusia bukan lagi bersaing dengan manusia, tetapi dengan robot, sehingga harus dicarikan metode baru untuk membenahi ini,” ungkap Irgan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, Selasa (12/3).

Menurut legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, tidak ada gunanya jika daerah mempunyai jalan bagus dan kota yang bersih, tapi angkatan kerjanya tidak mempunyai keterampilan. Ia menilai, hal ini bisa berbahaya di masa depan, karena membengkaknya pengangguran akibat penerapan digitalisasi industri *online* yang menggantikan tenaga manusia.

“Hal ini harus segera dicarikan penyelesaian masalah pengangguran ini, maka pemda harus memberi perhatian

yang bergerak di bidang literasi. Salah satu yang menjadi catatan adalah kurangnya fasilitas untuk penyandang disabilitas.

“Perlu kita tindaklanjuti dan kita catat sebagai masukan yang baik. Sejumlah pihak memohon untuk memberikan fasilitas terhadap kaum disabilitas khusus di perpustakaan ini, seperti yang saya lihat di Perpustakaan Nasional itu banyak sekali fasilitas untuk disabilitas. Tapi di daerah ini belum ada,” imbuh Djoko.

Legislator dapil Jawa Tengah III ini mengungkapkan catatan ini sangat berharga dan akan dibahas saat rapat kerja dengan pemerintah, guna meminta adanya perhatian pemerintah untuk penyandang disabilitas. “Pemerintah perlu untuk bisa memberikan akses untuk Bergeraknya para kaum disabilitas,” ungkap Djoko.

Terlepas dari catatan tersebut, secara keseluruhan pengelolaan perpustakaan di Ungaran ini relatif baik. Terhadap kekurangan yang diungkapkan di atas akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan saat Komisi X DPR RI melakukan pendalaman dengan pemerintah melalui rapat kerja. ■ **hs/sf**

kepada BLK sebagai tempat melatih masyarakat untuk bisa menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Di sini juga Kemenaker harus memberikan supervisinya dengan baik, skema pelatihan, modul, pilihan jurusan dan potensi daerah harus dikembangkan,” tegas legislator dapil Banten itu.

BLK daerah, kata Irgan, harus melakukan seperti BLK Pusat 3R, yaitu *rebranding*, revitalisasi dan reorientasi. Jika BLK punya banyak jurusan, cukup 3-4 jurusan yang diberi pendidikan secara masif. “Bahkan istilah sekarang *triple skill*. *Up skill* untuk yang punya *skill*, *re-skill* untuk mereka yang punya *skill* tertentu. Seperti mekanik otomotif, lalu pindah ke keterampilan las, karena dunia kerja akan selalu dinamis,” saran Irgan.

Untuk menarik para pengangguran sekaligus menghidupkan demi keberlanjutan BLK, Irgan mengusulkan BLK di daerah-daerah melakukan kerja sama dengan perusahaan yang sesuai dengan keterampilan yang diajarkan di BLK. Misalnya BLK otomotif, bisa kerja sama saja dengan perusahaan otomotif, sehingga lulusan BLK tersalurkan dengan baik. ■ **man/sf**

Negara Harus Hadir Lindungi Anak Terlantar



Foto: Ane | Iri

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat melakukan peninjauan ke Panti Pelayanan Sosial Anak “Mandiri” di Semarang, Jawa Tengah bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI

Permasalahan anak terlantar dan anak bermasalah memerlukan perhatian khusus dari negara, mengingat tingkat kriminalitas yang melibatkan anak mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Karenanya, negara harus hadir memberikan perlindungan bagi anak terlantar.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily di sela-sela peninjauan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Panti Pelayanan Sosial Anak “Mandiri” di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/3). Peninjauan tersebut dalam rangka mengawasi program rehabilitasi sosial.

“Dalam konstitusi kita jelas dikatakan bahwa anak yang bisa diawasi keluarganya adalah tanggung jawab negara. Apalagi anak-anak yang tidak ada didalam asuhan keluarganya, negara harus hadir memberikan pelayanan kepada mereka,” papar Ace.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, pemerintah perlu menyadari anak terlantar perlu mendapatkan

perlindungan selayaknya anak normal. Sebab, tak jarang anak terlantar rentan menjadi korban kekerasan seksual, akibat kurangnya pengawasan dari orang dewasa dan faktor ekonomi.

Sebelumnya, Kementerian Sosial RI mengklaim bahwa jumlah anak terlantar setiap tahunnya menurun. Misalnya pada tahun 2015, dari 33.400 anak menurun menjadi 20.719 anak pada 2016 dan kemudian turun lagi menjadi 16.416 anak pada tahun 2017. Namun, jumlah tersebut dinilai masih tinggi.

Menurut Ace, untuk mencapai Indonesia Bebas Anak Jalanan seperti yang dicanangkan Kemensos RI pada tahun 2016, maka pemerintah juga perlu mengidentifikasi akar permasalahan sosial tersebut. “Jika tidak bisa diselesaikan melalui ketahanan keluarga, maka harus memberikan pelayanan kepada mereka dan mereka harus direhabilitasi secara sosial,” sambungnya.

Legislator dapil Banten itu menambahkan, secara umum permasalahan anak juga banyak ditemui di kota-kota besar karenanya Panti Sosial Anak (PSA) dalam melakukan pengawasan serta rehabilitasi bagi anak terlantar perlu meningkatkan sarana dan prasarananya, sehingga anak bisa mendapatkan keterampilan yang khusus untuk menunjang kehidupan mereka. ■ **ann/sf**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat. Menurutnya, kehadiran perpustakaan bisa mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, dan mandiri.

“Maksud kunjungan kerja ini adalah menyamakan persepsi dengan para pemangku kepentingan bidang perpustakaan, bahwa perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa,” papar Fikri saat

Perpustakaan Wahana Belajar Sepanjang Hayat

memberikan sambutan dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di ruang pertemuan Pendopo Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (08/3).

Kunjungan Komisi X DPR RI ini disambut hangat oleh Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan juga Wakil Bupati Kudus Hartopo. Hadir pula Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI Sri Sumekar. Menurut Fikri, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, dengan tujuan meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui

upaya menumbuhkembangkan budaya gemar membaca.

Politisi Fraksi PKS ini juga

“Dalam upaya memajukan kebudayaan nasional sekaligus dalam upaya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perpustakaan juga menjadi wahana pelestarian kekayaan budaya dan wajib menumbuhkembangkan budaya gemar membaca.”



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meninjau perpustakaan usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di ruang pertemuan Pendopo Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah

menekankan bahwa pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Menurutnya, dalam upaya memajukan kebudayaan nasional sekaligus dalam upaya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perpustakaan juga menjadi wahana pelestarian kekayaan budaya dan wajib menumbuhkembangkan budaya gemar membaca.

“Salah satunya dengan mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam,” ujar Fikri sembari menjelaskan, setelah lahirnya UU Perpustakaan sejak tahun 2007, seharusnya program pengembangan deposit bahan pustaka meningkat, serta melalui program pengembangan perpustakaan desa mampu meningkatkan budaya membaca masyarakat. ■ eko/sf



Foto Eko Irfi

Manfaat PSBI Dirasakan Masyarakat Pertanian

Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) untuk sektor pertanian sudah menunjukkan pemanfaatan bagi masyarakat. Akan tetapi masih terdapat permasalahan yang dirasakan oleh petani bawang merah.



Foto Arief Irfi

Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar bersama Tim Kunspek Komisi XI DPR RI saat dialog dengan petani bawang di Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Salah satunya, yang menjadi temuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI adalah merosotnya harga jual bawang merah saat musim panen, sehingga petani harus menjual komoditasnya dengan harga relatif murah.

“Diperlukan pelatihan petani agar bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas, serta penyelesaian permasalahan air yang masih menggunakan air hujan, karena saluran irigasi yang bermasalah,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar usai dialog Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan petani bawang di Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa (12/3).

Legislator Partai Gerindra itu

menilai, melalui PSBI, Bank Indonesia (BI) tidak semata-mata sebagai lembaga perbankan yang mengatur regulasi perbankan, tetapi membantu masyarakat dalam pengendalian suplai serta intervensi pasar dengan pemerintah daerah, agar para petani bawang merah terselamatkan.

“Ini permasalahan yang kita dengar langsung dan mudah-mudahan ada solusinya. Mereka juga berharap pemerintah dapat mengendalikan impor produk yang juga dihasilkan oleh petani, agar produksi bawang mereka bisa diserap oleh pasar, dan tidak dibandingkan dengan bawang hasil impor. Harapan mereka, harga bawang bisa lebih baik ke depannya sampai harga sekitar Rp 15 ribu per kilogram,” tutup legislator dapil NTB itu.

■ afr/sf

PSBI Berhasil Jaga Stabilitas Inflasi Jabar

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengapresiasi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang telah berhasil mengendalikan angka inflasi di Jawa Barat, sehingga PSBI ini harus menjadi program unggulan guna menjaga stabilitas inflasi.

Diketahui, tinggi atau rendahnya inflasi itu dipengaruhi oleh jumlah komoditas di masyarakat. Karena itu, dalam rangka pengendalian inflasi, PSBI berperan dalam menjaga ketersediaan komoditas tersebut agar berada dalam jumlah yang proporsional.

“Setelah beberapa tahun berjalan,

banyak program PSBI ini dinikmati oleh berbagai kalangan. Tentunya Bank Indonesia memiliki peran terkait masalah moneter dan sistem pembayaran yang mana di dalam moneter terkait inflasi dan nilai tukar terhadap inflasi itu dipengaruhi oleh berbagai macam keberadaan komoditas,” ujar Heri usai mengikuti dialog Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan penerima PSBI di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa (12/3).

Melalui PSBI, BI didorong untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada penerima PSBI. Tercatat ada beberapa bidang PSBI yang dilakukan yakni bidang pendidikan, pertanian, ketahanan pangan dan program sosial. Semua program itu bersinergi dalam menjaga komoditas dan stabilitas inflasi.



Foto: Hendra/mi

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat mengikuti dialog Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan penerima PSBI di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat

Kesejahteraan Pustakawan Perlu Perhatian Pemerintah



Foto: Devi/mi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan mitra kerja terkait di Demak, Jateng

Profesi pustakawan memegang peranan penting bagi perpustakaan, mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong agar kesejahteraan hidup para Pustakawan juga perlu mendapatkan perhatian lebih dari

pemerintah.

Selain itu, Hetifah juga menyampaikan bahwa fungsi Perpustakaan saat ini bukan hanya sebagai tempat menyimpan bahan pustaka buku dan tempat orang yang gemar membaca saja, tetapi perpustakaan telah

berkembang menjadi sebuah tempat bagi orang-orang yang ingin mencari ide untuk mewujudkan harapannya.

“Kita mendorong adanya pengembangan fungsi perpustakaan. Kami juga mendorong agar pemerintah daerah memiliki keberpihakan dalam hal pengalokasian anggarannya guna memajukan perpustakaan,” tegas Hetifah saat memimpin Tim Kunjungan

Karena itulah, kondisi perekonomian di Jawa Barat tergolong baik. Tercatat, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang berada di angka 5,6 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 3,13 persen.

“Karena itu kita ingin mengetahui dan bertemu dengan beberapa penerima PSBI tentang apa yang sudah dilakukan dan apa saran yang bisa disampaikan. Kita ini berharap masukan yang disampaikan tadi bisa kita tindak lanjuti kepada Bank Indonesia,” sambung legislator dapil Sukabumi ini sembari berupaya terus mendorong agar PSBI ini bisa terus dioptimalkan tiap tahunnya.

Heri pun memastikan Komisi XI DPR RI akan terus mendorong PSBI ini menjadi bagian penting dalam rangka menjaga kualitas perekonomian di Indonesia. “Tentunya ya agar dalam penyusunan anggaran berikutnya PSBI mendapat anggaran yang lebih proporsional terkait dukungannya untuk tupoksi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneterinya. Komisi XI terus mendukung PSBI ini,” tutup legislator Partai Gerindra ini. ■ **hs/sf**

Keja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (08/3).

Di sisi lain, lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu, masalah literasi dan daya minat baca di Indonesia juga masih belum meningkat. “Ini menjadi tugas bersama. Seperti kita ketahui bersama, tingkat literasi sekarang ini baru mencapai 41 persen dari jumlah penduduk. Belum lagi masalah kunjungan orang ke perpustakaan yang masih kurang dari 2 persen per hari dari jumlah penduduk Indonesia,” jelasnya.

Ia menambahkan, tujuan kedatangan Komisi X DPR ke Demak adalah untuk mendapatkan informasi terkini mengenai implementasi Undang-Undang (UU) Perpustakaan, sekaligus mensosialisasikan UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR). “Di samping itu, kami juga ingin tahu bagaimana implementasi program deposit bahan pustaka dan masalah anggaran perpustakaan,” imbuhnya.

Dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan beberapa *stakeholder* dan mitra kerja, beberapa pustakawan sempat menyampaikan berbagai keluhan dan kendala yang mereka hadapi di lapangan, diantaranya mengenai keterbatasan referensi buku. Oleh karenanya mereka berharap agar ada penambahan koleksi buku. ■ **dep/sf**

PSBI Angkat Keunggulan Lokal Bali

Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) di Provinsi Bali sangat diapresiasi karena telah mengangkat potensi keunggulan lokal. Produk kopi, bawang putih, cabai, dan kain tenun jadi salah satu komoditas yang dibina lewat PSBI.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengapresiasi PSBI yang dijalankan Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali.

“Saya lihat ada beberapa keunggulan lokal yang diangkat oleh BI menjadi bernilai jual tinggi. Bila PSBI ini ditujukan untuk menanggulangi inflasi, maka di sini terjawab,” tegas Hafisz yang ditemui usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Kepala Perwakilan BI Bali di Denpasar, Selasa (12/2).

Upaya yang telah dilakukan BI di Bali merupakan aksi nyata untuk menghidupkan ekonomi rakyat. Ketika ekonomi rakyat bergeliat, neraca pembayaran dan defisit nasional juga bisa teratasi. PSBI di Bali cukup berhasil. Dalam pertemuan itu dipamerkan pula hasil produk binaan PSBI. Ada bawang putih dan cabai yang produknya bisa menyaingi komoditas ekspor.

Hafisz melihat, cabai di Bali tidak kalah dengan Thailand. Cabainya lebih pedas dan berisi. Begitu juga bawang putihnya begitu besar menyaingi bawang putih ekspor dari Thailand. Tak kalah pula kopi Bali yang sangat kaya. Semua ini jadi keunggulan Bali yang berhasil diekspos oleh BI. “Saya harap ini terus dilakukan BI tidak hanya di Bali tapi juga di provinsi-provinsi lain yang punya keunggulan lokal dan bernilai jual tinggi,” harapnya.

Lebih jauh legislator dapil Sumsel I itu menyatakan, PSBI harus berekspansi melihat komoditas lainnya yang belum tersentuh. Sebut saja karet di Pulau Sumatera yang sangat kaya. Bahkan, karet Indonesia terbesar di dunia. Pesaingnya justru dari dua negara ASEAN, yaitu Malaysia dan



Foto: Husen/rni

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Kepala Perwakilan BI Bali di Denpasar

Thailand. Selain karet, produk tenun Nusantara juga sejauh ini belum tersentuh PSBI.

Kain tenun Indonesia selalu diincar pasar negara-negara barat, karena punya nilai seni tinggi dan berbeda dengan alat tenun mesin. Tenun tradisional Indonesia punya nilai artistik. Harga jualnya juga lebih tinggi daripada produk pabrikan. “Kalau di Palembang ada kain songket. Ini bisa dijual 100 dolar per helai. Padahal modalnya hanya Rp 400 ribu. Kalau ini terus kita genjot bisa menambah devisa dan mengatasi defisit keuangan,” kilah politisi PAN ini. ■ **mh/sf**

Perlindungan Nelayan Belum Maksimal

Perlindungan dan jaminan terhadap para nelayan di Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan maksimal. Dari total 160.000 tenaga kerja yang bekerja sebagai nelayan baru 50 persen yang mendapat jaminan sosial.

Hal ini perlu menjadi perhatian dan kerja keras oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar mereka bisa mendapatkan perlindungan.

Usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR

RI dengan BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Perikanan, Dinas Ketenagakerjaan, serta himpunan dan asosiasi persatuan nelayan se-Sumut, di Medan, Selasa (12/3), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Saleh juga meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan, khususnya pengawas ketenagakerjaan di Sumut untuk melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan para pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. "Jika ada yang memang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar ditindak dengan tegas," tandas legislator Partai

Amanat Nasional (PAN).

Di sisi lain, dalam pertemuan itu, para nelayan menyampaikan aspirasi terkait persoalan penggunaan alat tangkap dan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) ketika mereka melaut, agar bisa dicarikan solusinya oleh pemerintah. "Dinas Ketenagakerjaan untuk segera memenuhi kebutuhan itu. Karena kita tidak menginginkan juga ada nelayan kita yang melaut tanpa ada perlindungan yang maksimal," ungkapnya.

Politisi dapil Sumatera Utara II ini berharap ada upaya lintas pihak terkait untuk bekerja sama melakukan perlindungan, seperti antara Dinas Perikanan dengan Dinas Ketenagakerjaan. "Jangan sampai saling lempar tanggung jawab antara satu dinas dengan dinas yang lain, karena sebetulnya ini tanggung jawab bersama dari pemerintah untuk kepentingan bersama untuk para nelayan," pesan Saleh. ■ **azk/sf**



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Perikanan, Dinas Ketenagakerjaan, serta himpunan dan asosiasi persatuan nelayan se-Sumut

Bukan Sekadar Slogan, Kesetaraan Gender Harus Diwujudkan

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan peringatan *International Women's Day (IWD)* yang jatuh setiap tanggal 8 Maret adalah momentum bersama untuk memperjuangkan kesetaraan gender.



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf

Foto: BKSAP | InI



Foto: Azka | InI

Hal ini diperlukan seiring dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.

Politisi Partai Demokrat ini mendorong peringatan IWD selanjutnya berfokus pada langkah nyata untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender di berbagai bidang melalui sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Saat ini, slogan saja tidak cukup untuk memastikan bahwa kesetaraan gender dapat terwujud di berbagai lapisan kepemimpinan di masyarakat. *We do not need slogan anymore, we need equality in reality,*” tegas Nurhayati dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, Jumat (08/03).

Menurut Nurhayati, dibutuhkan komitmen berupa langkah nyata yang bisa dilakukan oleh wanita maupun pria, yaitu dengan berperan secara aktif dan mengambil tongkat estafet kepemimpinan pada berbagai sektor di lingkungan sekitarnya, serta mendukung kaum wanita menjadi pemimpin dengan tidak memberikan *stereotype* negatif bagi wanita yang memilih untuk berkarier di luar rumah.

“Terlebih di era Revolusi Industri 4.0. Saat ini, perempuan menghadapi peluang dan tantangan yang lebih kompleks, sehingga dibutuhkan penguatan kapasitas perempuan terhadap akses teknologi dan kepastian atas terciptanya peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berkarier di bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*),” ujarnya.

Nurhayati menambahkan, Indonesia adalah salah satu negara dunia yang telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW)* dan mengadopsi *Beijing Platform for Action*. Dalam hal ini, maka peran dan partisipasi DPR RI sangatlah penting dalam membentuk kebijakan guna mengawasi legislasi dan anggaran yang menjamin kesetaraan gender.

Legislator dapil Jawa Timur V ini yakin, dengan memberikan perempuan dan anak perempuan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan representasi dalam berbagai proses pengambilan keputusan, baik politik maupun ekonomi merupakan pilar pokok dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. ■ **ann/sf**



Kepala Sub Bagian Penerangan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setjen dan BK DPR RI Erna Agustina

Foto: Ria Irfani

Hal ini agar citra DPR RI sebagai lembaga negara yang kompeten di ketiga fungsinya mendapat sorotan baik dari publik.

“Diharapkan kepada sekretariat Fraksi dan TA, hasil (kajian) yang kami sampaikan dapat digunakan di dalam rapat-rapat kerja maupun rapat dengar pendapat, sehingga DPR RI tidak dianggap sepi, tapi rapat-rapat berjalan dengan baik,” katanya usai membuka konsinyering pembahasan buku ringkasan dan telaahan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2018 Ruang Lingkup Komisi I DPR RI sampai dengan XI DPR RI, di Aula Griya Sabha, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/03). Kegiatan ini turut dihadiri Sekretariat dan TA Fraksi terkait.

PKAKN, menurut Helmi, merupakan salah satu pusat kajian yang berada di bawah naungan BK DPR RI selaku *supporting system* yang menunjang tugas-tugas Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya. Mengingat PKAKN dan BAKN juga melakukan telaahan yang sama dan saling menunjang dan mendukung soal hasil pemeriksaan BPK RI tersebut untuk nantinya disampaikan kepada seluruh AKD.

Perlu Sinergi Optimalikan Hasil Kajian dan Telaahan BPK

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar berharap kepada Kepala Sekretariat Fraksi dan Tenaga Ahli Fraksi untuk dapat menyampaikan hasil kajian dan telaahan PKAKN DPR RI terhadap hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2018 Ruang Lingkup Komisi I sampai dengan XI kepada Anggota Dewan terkait di dalam rapat-rapat Komisi.

“PKAKN itu langsung di bawah Badan Keahlian DPR RI, jadi kita selaku *supporting system* yang menunjang tugas-tugas BAKN. Diminta maupun tidak diminta, kami selalu menyiapkan data dan telaahan hasil analisa untuk Anggota BAKN. Intinya penugasan kami lebih kepada sisi anggaran dan fungsi pengawasan,” ungkap Helmi.

Sementara Koordinator Analisis APBN Komisi I DPR RI sampai dengan IV DPR RI Suryadharma berharap dengan adanya hasil kajian dan telaahan PKAKN terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat menjadi suatu bahan dasar yang menarik untuk

ditelaah, mengingat saat ini hasil kajian dan telaahan yang ada hanya diperlakukan secara formalitas.

“Yang diharapkan adalah, hasil pemeriksaan BPK RI itu menjadi suatu bahan dasar yang menarik untuk ditelaah, diungkap dan ditindaklanjuti. Karena selama ini mungkin masih sekadar formalitas, namun tidak mengurangi dari yang sudah dikerjakan. Tapi ini menjadi hal yang pusat perhatian, jadi bukan hanya sekedar menyelesaikan, tapi juga harus diangkat untuk mengawal tindaklanjutnya, itu yang paling utama,” tutupnya. ■ **ndy/sf**

Kepala Sub Bagian Penerangan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setjen dan BK DPR RI Erna Agustina mengatakan, kehadiran DPR RI pada pameran ini menjadi yang ketiga kalinya selama pelaksanaan legislatif expo.

Erna mengatakan, stan DPR RI sengaja dibuat tidak memiliki pintu, dan terbuka di sisi kiri dan kanannya, sehingga masyarakat bisa masuk dengan bebas selama acara berlangsung. “Setiap tahun kami menampilkan isi yang berbeda di stan kami. Desain booth ini menunjukkan bahwa DPR sangat terbuka untuk mendekatkan DPR dengan masyarakat. Agar masyarakat tahu tugas dan fungsi Anggota DPR, “ jelasnya.

Selain itu, lanjut Erna, dalam pameran ini Humas DPR RI juga menampilkan semua hasil kerja DPR RI periode 2014-2019, terutama produk undang-undang (UU) yang ditetapkan oleh DPR RI, sehingga bisa diketahui masyarakat. Produk yang dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 42 UU, kemudian tahun 2015 ada 13 UU, tahun 2016 sebanyak 20 UU, tahun 2017 ada 18 UU, dan tahun 2018 sebanyak 10 UU.

Kemudian, kata Erna, Humas DPR RI juga memanfaatkan kesempatan legislatif expo itu, untuk mensosialisasikan keterbukaan parlemen atau *open parliament* yang sudah dideklarasikan pada 29 Agustus 2018 oleh Ketua DPR RI dan

DPR Ramaikan Legislatif Sulut Go Expo 2019

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI turut berpartisipasi dan meramaikan Legislatif Sulawesi Utara (Sulut) Go Expo VII tahun 2019 yang berlangsung di Manado Town Square, Manado, Sulut, pada 12-15 Maret 2019.

Pimpinan DPR RI. Langkah ini menjadikan DPR RI menjadi parlemen pertama di Asia Pasifik yang menyatakan komitmen keterbukaan parlemen.

“Indonesia menjadi negara ke 10 di dunia yang menjalankan prinsip-prinsip, keterbukaan parlemen, serta menjadi pelopor dan negara pertama yang menyusun rencana aksi terpisah

dari pemerintah,” kata Erna sembari menambahkan, DPR RI juga mengajak para pengunjung untuk berinteraksi melalui *games*, salah satunya Kahoot.

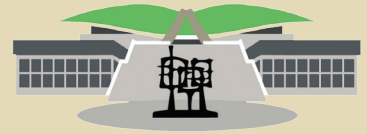
Kahoot adalah *games* berupa kuis berisikan 10 soal yang harus dijawab benar oleh peserta pengunjung booth, terkait tokoh serta tugas dan fungsi DPR RI. Apabila peserta memiliki skor sempurna, yakni 100, akan mendapatkan hadiah berupa bantal. Sementara bagi yang kurang beruntung tetap diberi hadiah *block note*.

Para pengunjung terlihat sangat antusias mengikuti *games* ‘DPR Challenge’, karena selain menguji pengetahuan para pengunjung seputar DPR RI, para pengunjung juga tertarik untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Hadiah-hadiah yang diberikan diantaranya adalah bantal, kaos, *tumblr*, payung, *block note*, pin dan pulpen. ■ **mm/sf**

Kahoot adalah games berupa kuis berisikan 10 soal yang harus dijawab benar oleh peserta pengunjung booth, terkait tokoh serta tugas dan fungsi DPR RI. Apabila peserta memiliki skor sempurna, yakni 100, akan mendapatkan hadiah berupa bantal.



Pengunjung meramaikan salah satu booth Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang turut berpartisipasi dan meramaikan Legislatif Sulawesi Utara (Sulut) Go Expo VII tahun 2019 yang berlangsung di Manado Town Square



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama dua pembicara menjadi narasumber pada diskusi Dialektika Demokrasi 'Menakar Efektivitas Debat Capres dalam Meraih Suara,' Kamis (14/03). Foto: Runi/rni



Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha saat menerima konsultasi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur terkait pembahasan LKPJ. Selasa (12/3), Foto: Erman/rni



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Pengurus Komunitas Tekstil Tradisional Indonesia (KTTI), Selasa (12/3). Foto: Oji/rni

